

membuka UKM sendiri namun terpaksa tutup karena kalah bersaing, tidak perlu dibantu untuk dihidupkan kembali. Pada dasarnya UKM jangan di paksa bertahan jika memang barangnya tidak lagi disukai oleh konsumen. (2) Hanya UKM yang memiliki potensi pasar karena punya keunggulan komparatif dan kompetitif yang perlu dibantu oleh pemerintah, jadi prinsip yang berlaku adalah “*picking the winners*”. (3) Fokus bantuan yang diberikan kepada UKM harus pada pengembangan teknologi dan inovasi. (4) Pemberian kredit bagi UKM tidak merupakan komponen yang paling penting. Pengalaman menunjukkan UKM yang mulai atau berkembang dengan sendirinya akan didatangi oleh perbankan. (5) Bantuan pada UKM tidak bersifat protektif, dalam konteks ini sejalan dengan prinsip yang bisa maju adalah UKM yang mampu bersaing bebas dalam kondisi pasar non-diskriminasi.

A. Strategi UKM Tas Dan Koper Awany dan Tri Jaya dalam menghadapi MEA

Belum kuatnya fundamental perekonomian Indonesia saat ini, mendorong pemerintah untuk terus memberdayakan Usaha Kecil Menengah (UKM). Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja cukup besar dan memberi peluang bagi UKM untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang lebih cenderung menggunakan modal besar. Pemberdayaan UKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan

kondusif. Dan tidak akan mungkin tingkat partisipasi rakyat sampai sedemikian tinggi, bila tidak disertai oleh interaksi yang positif antara seluruh elemen di kabupaten tersebut. Jenis usaha yang dilakukan masyarakat Sidoarjo, sesungguhnya adalah jenis aktivitas ekonomi yang juga ada di tempat lain. Misalnya, usaha jajanan, konveksi, tas dan koper, batik, bebek, kerupuk, pot, jamur, dan sebagainya.

Oleh karena itu, kabupaten Sidoarjo termasuk pada golongan daerah yang sangat siap dalam menyambut Masyarakat Ekonomi Asean tahun 2015 ini. Namun untuk tingkat nasional secara keseluruhan, tetap serahkan kepada pemerintah pusat. Dalam hal kesiapannya menghadapi MEA 2015, setiap bulannya pemerintah setempat melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumberdaya Mineral (Disperindag) mengadakan pembekalan dalam bentuk *training* atau pelatihan mengenai masalah produksi, pengemasan sampai pemasaran kepada para pelaku usaha di daerahnya. Seperti yang diungkapkan Ibu Cucuk Susilaningsih selaku Kepala Seksi pembinaan dan pemasaran;

“Kami dari pihak Dinas UKM mulai mengadakan pembekalan melalui pelatihan-pelatihan. Pelatihan mengenai masalah produksi, pengemasan, pemasaran kepada UKM. Dari situ kami berharap pengrajin UKM sadar dengan kriteria-kriteria dalam menghadapi MEA 2015. Pembekalan untuk menghadapi MEA 2015 itu sudah dari tahun 2009. Pembekalan disini terkadang menggunakan computer agar para pelaku UKM lebih mudah mengakses kemajuan desain-desain dan kiat-kiat produksi dari internet. Dari mulai membekali pelaku UKM membuat tas, koper, sepatu, dan jaket yang berkualitas, sampai dengan mengajak serta pelaku UKM mengikuti pameran-pameran yang dilaksanakan di Surabaya, Sidoarjo, bahkan ke NTB juga, kalau yang ke NTB itu rencananya bulan

menghimbau agar UKM berkenan mendaftarkan dan mematenkan merek usahanya, ini di karenakan pasar internasional (*free trade*) tidak akan menerima jika barang yang bersangkutan tidak memiliki ijin edar.

Dalam perjanjian *Free Trade*, setiap partisipan akan berjuang untuk meraup keuntungan dengan mengkhususkan diri pada produksi barang dan jasa yang mana barang tersebut memiliki keunggulan komparatif dan mengimpor barang dan jasa terhadap negara yang memiliki kelemahan komparatif. Dengan adanya perjanjian *Free Trade*, diharapkan kepada para pengrajin UKM Tas dan Koper untuk bisa memproduksi Tas dan koper yang memiliki keunggulan komperatif agar mampu bersaing dalam MEA 2015 yang didalamnya hambatan – hambatan (seperti tarif dan kuota) di antara negara – negara anggotanya di hapuskan. Namun tetap memberlakukan hambatan berdagangan terhadap negara yang bukan anggota Asean.

Optimisme pemerintah akan kesiapan perekonomian di Sidoarjo ini dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean, mempengaruhi minimnya upaya penyiapan perekonomian Indonesia secara lebih matang dalam sektor-sektor yang sangat penting. Keyakinan pemerintah Sidoarjo akan ideologi neoliberalisme mencerminkan eksistensi hegemoni yang melahirkan praktik-praktik kebijakan yang bertumpu pada peranan pasar, sehingga pemerintah tidak merasa perlu memainkan peranan yang strategis dalam mendorong kemajuan ekonomi, dengan

